

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN PITA CUKAI (Studi Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021)

Oleh

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

Penyelundupan merupakan kegiatan pemasukan barang secara ilegal dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi memberatkan terdakwa Rendy Septianto dengan pembayaran pidana denda sebanyak 5 (lima) kali nilai cukai sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung meringankan terdakwa dengan pembayaran pidana denda sebanyak 2 (dua) kali nilai cukai. Permasalahan Penelitian: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama & tingkat banding pada Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 dan Apakah putusan hakim Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 telah memenuhi asas cita hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama dan tingkat banding pada putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 secara yuridis terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Secara filosofis hakim mempertimbangkan dengan unsur menitikberatkan nilai keadilan kepada

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Asas cita hukum dalam Putusan Nomor 174K/Pid.Sus/2021 secara asas kepastian hukum sudah sesuai dengan penerapan pasal yang menjerat terdakwa. Secara asas keadilan bahwa penjatuhan pidana denda merupakan pilihan hakim untuk memberikan efek jera. Denda yang diringankan diharap mampu memberikan keadilan sekaligus rasa jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara asas kemanfaatan hukum hakim memelihara keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim yang memutuskan perkara pidana penyelundupan minuman beralkohol hendaknya secara konsisten memutuskan perkara dengan pidana denda yang berat agar menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan kepada masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama. Asas cita hukum dalam putusan tersebut sudah cukup terpenuhi pada putusan *judex factie* yang mengedepankan asas kepastian hukum dibandingkan asas kemanfaatan dan asas keadilan, sedangkan pada putusan *judex juris* merupakan harmonisasi dalam ketiga asas tersebut.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Penyelundupan, Cukai

**ANALYSIS OF CRIMINAL FINE DECISIONS IN THE
CRIME OF SMUGGLING ALCOHOLIC DRINKS
USING EXCISE STAMPS**
(Study Decision Number: 174K/Pid.Sus/2021)

By

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

Smuggling is the activity of illegally importing goods with the aim of evading customs and excise. Excise is a state levy that is used for state needs for the prosperity of the people. The District Court's decision and the High Court's decision burdened the defendant Rendy Septianto with paying a criminal fine of 5 (five) times the excise value, while the Supreme Court decision relieved the defendant with paying a criminal fine of 2 (two) times the excise value. Research Problems Is the basis for the judge's considerations in handing down a criminal decision a fine that is lighter than the decision at the first level & the appeal level in Decision Number: 174K/Pid.Sus/2021 and Is the judge's decision Number: 174K/Pid.Sus/2021 has fulfilled the principles of legal ideals.

The research approach used is normative juridical and empirical juridical. The resource person for this research is the District Court Judge class IA Tanjung Karang and a Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of this research are the judge's basic consideration in handing down a criminal decision of a fine is lighter than the decision at the first level and the appeal level in decision Number: 174K/Pid.Sus/2021, legally the defendant has been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as regulated in Article 54 of Law Number 11 of 1995 concerning Excise as amended by Law Number 39 of 2007. Philosophically the judge considers it with an element of emphasizing the value of justice for the defendant. Sociologically, the judge considers aggravating and mitigating factors for the defendant.

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

The principle of legal ideals in Decision Number 174K/Pid.Sus/2021 is based on the principle of legal certainty in accordance with the application of the article that ensnared the defendant. According to the principle of justice, imposing a fine is the judge's choice to provide a deterrent effect. It is hoped that the reduced fine will be able to provide justice as well as a deterrent for the defendant so that he does not repeat his actions again. Based on the principle of legal expediency, judges maintain a balance between justice and legal certainty for the defendant.

The suggestions in this research are judges who decide criminal cases of alcohol smuggling should consistently decide cases with heavy fines so that they have a deterrent effect on the perpetrators and so that other people do not do the same thing. The principle of legal ideals in the decision is sufficiently fulfilled in the *judex factie* decision which prioritizes the principle of legal certainty rather than the principle of expediency and the principle of justice, while the *judex juris* decision is a harmonization of these three principles.

Keywords: Judge's considerations, criminal fines, smuggling, excise